

BENEFIT BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP STRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT

A. A. GDE PUTRA PEMAYUN

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

putrapemayun@undiknas.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji “ Benefit Badan Usaha Milik Desa terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat”. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga komersial (*commercial institution*) dan sosial (*social institution*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh benefit BUMDes terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat di Desa Tohpati Kecamatan banjarangkan Kabupaten Klungkung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik proporsional sampling terdiri dari pengelola BUMDes serta masyarakat pengguna jasa keuangan BUMDes di Desa Tohpati Klungkung. Pembangunan berkelanjutan dapat mengundang semua pihak terutama anggota masyarakat Desa Tohpati Klungkung Bali untuk mengelola sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan sistem pendukung penting lainnya. Mempertahan pembangunan berkelanjutan merupakan keharusan bagi masyarakat Desa Tohpati Klungkung karena terbukti dapat mengurangi pengangguran dan menambah *income* bagi masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa Desa Tohpati Klungkung Bali telah berkembang pesat akibat benefit BUMDes terinspirasi bagi masyarakat pengguna jasa keuangan agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber dana dan perluasan kesempatan kerja bagi Angkatan kerja.

Kata kunci : *Benefit BUMDes, Struktur ekonomi dan Sosial, Masyarakat Desa*

ABSTRACT

This study examines the "Benefits of Village Owned Enterprises to the economic and social structure of society". BUMDes is a pillar of economic activity in the village that functions as a commercial and social institution. The purpose of this study was to determine the effect of BUMDes benefits on the economic and social structure of the community in Tohpati Village, Banjarangkan District, Klungkung Regency. This study used a qualitative descriptive method, using a proportional sampling technique consisting of BUMDes managers and the community using BUMDes financial services in Tohpati Klungkung Village. Sustainable development can invite all parties, especially members of the Tohpati Klungkung Bali Village community to manage human resources to meet economic, social and other important support system needs. Maintaining sustainable development is a must for the people of Tohpati Klungkung Village because it has been proven to reduce unemployment and increase income for the community. The results of the study show that the village of Tohpati Klungkung Bali has grown rapidly as a result of BUMDes benefits being inspired by the community using financial services to increase efficiency and effectiveness in managing sources of funds and expanding employment opportunities for the work force.

Keywords: *BUMDes Benefits, Economic and Social Structure, Village Communities*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi mulai terasa yaitu adanya peningkatan kemakmuran masyarakat Desa Tohpati dari tahun ketahun. Sektor ekonomi telah menjadi salah satu tumpuan masyarakat Desa Tohpati dalam meningkatkan taraf hidupnya dan harus diperjuangkan secara berkelanjutan. Inilah pentingnya perwujudan pembangunan ekonomi berkelanjutan tak dapat dipungkiri, perkembangan sektor ekonomi memang mendatangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hal ini yang kemudian diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup rakyat. Hal ini yang harus diperhatikan, sadarkan kalau sektor ekonomi dan social dapat mendatangkan kesempatan kerja seluas-luasnya dan peningkatan pendapatan Desa. Pembangunan ekonomi dan social berkelanjutan yang didukung masyarakat harus diwacanakan terus menerus agar kemakmuran masyarakat segera terjadi. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap program *Sustainable Development Goals* Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal tahun, PBB

bekerja meningkatkan kesadaran masyarakat global untuk ekonomi dan social sebagai katalis perubahan ke arah yang lebih positif. Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan permintaan pasar. Sedangkan tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar operasional BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa Tohpati Klungkung. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih berdaya.

Beberapa hasil studi yang pernah dilakukan yang relevan dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini dapat dikemukakan seperti berikut. Berdasarkan penelusuran studi-studi tentang Klungkung sebagai berikut :

Penelitian dari Ni Komang Erawati (2012) dengan Judul "Analisis pola pertumbuhan ekonomi dan sector potensial di Kabupaten Klungkung ". Desentralisasi menuntut pemerintah daerah lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan sebagai sector potensial. Kabupaten Klungkung sebagai salah satu daerah yang masih bercorak agraris memiliki peluang yang cukup besar dalam mengembangkan potensi daerah yang dimiliki dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Klungkung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi dilihat dari sisi pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan, mengetahui sector ekonomi potensial dan mengetahui peluang/kesempatan kerja yang mampu diciptakan oleh sector ekonomi potensial di Kabupaten Klungkung. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan, baik pertumbuhan, kontribusi dan per kapitanya, dan data jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja. Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu metode dokumentasi, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan alat analisis Tipologi Klassen, Location Quotients (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Overlay, dan Rasio Penduduk Pengerjaan (RPP). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung periode 2008-2010 berada pada zone daerah makmur yang sedang menurun. Sektor ekonomi yang potensial dikembangkan, yaitu sector bangunan dan jasa-jasa. Dari sector-sector tersebut muncul beberapa sub sector yang potensial, yaitu sub sector jasa swasta. Peluang/kesempatan kerja yang diciptakan sector bangunan rata-rata hanya 3,01 persen dan sector jasa rata-rata 5,96 persen, masih sangat minim bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Klungkung.

Juga penelitian dari Ni Luh Aprilia Kesuma (2015) dengan judul " Analisis sector unggulan dan pergeseran pangsa sector-sector ekonomi Kabupaten Klungkung ". Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator perkembangan ekonomi negara sehingga negara tersebut harus memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonominya. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali selama 2008 hingga 2012. Penentuan dan pergeseran pangsa sector-sector utama di Klungkung dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sector ekonomi terhadap PDB. Ada dua tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan sector unggulan ekonomi dan pergeseran pangsa sector ekonomi di Klungkung. Hal itu dapat dilihat dari kontribusi PDB masing-masing sector selama 2008 hingga 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari BPS Klungkung dan BPS Bali. Ada dua analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis Location Quotient (LQ) dan analisis Shift Share. Hasil analisis Location Quotient (LQ) terdapat empat sector unggulan Klungkung yaitu sector pertanian, sector pertambangan dan penggalan, sector konstruksi, dan sector jasa. Menurut analisis Shift Share, total (Gij) sector jasa memiliki nilai positif terbesar diikuti oleh sector industri. Sementara sector pertanian memiliki nilai negatif. Jadi bisa dikatakan bahwa Klungkung menggeser struktur ekonomi dari sector pertanian ke sector jasa.

Terakhir penelitian dari I Wayan Mudana (2017) dengan judul "Komodifikasi seni lukis wayang Kamasan sebagai produk industri kreatif penunjang pariwisata ".Sebagai produk industri kreatif penunjang pariwisata komodifikasi merupakan proses yang tidak hanya berhubungan dengan bagaimana produksi menjadi produk massa, tetapi juga berhubungan bagaimana produk tersebut dapat didistribusikan ke pasar untuk memenuhi

kebutuhan konsumen. Seni lukis wayang Kamasan merupakan fenomena komodifikasi dan industri kreatif yang menarik untuk dikaji secara kritis dengan pendekatan culture studies untuk mengetahui keinginan pariwisata. Sebagai alat analisis digunakan teori teori komodifikasi. Metode yang digunakan mengkaji penelitian komodifikasi adalah metode kritis yang bersifat emansipatoris, melibatkan pelukis, dan pelaku bisnis (industri pariwisata). Hasil penelitian ini; (1) produksi seni lukis wayang Kamasan sudah terjadi pengkaburan makna dari makna simbolik menjadi makna ekonomi, keos (*brecolage*), dan menjadi produksi massa, (2) distribusi seni lukis wayang Kamasan di pasar sangat dinamis, selain untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga pasar global berupa produk kreatif. (3) konsumsi seni lukis wayang Kamasan tidak hanya oleh masyarakat lokal sebagai persembahan, tetapi juga oleh pariwisata sebagai souvenir. Dari ke-tiga penelitian terdahulu di atas penelitian ini berbeda, sedangkan penelitian ini focus kajiannya tentang “Benefit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap struktur ekonomi dan social di Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas maka pokok permasalahan dalam kajian ini :

1. Bagaimanakah pengaruh benefit BUMDes terhadap struktur ekonom dan sosial masyarakat?
2. Bagaimanakah implementasi pengguna jasa keuangan BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui pengaruh benefit BUMDes terhadap struktur ekonom dan sosial masyarakat?
2. Mengetahui dampak implementasi pengguna jasa keuangan BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat sekitarnya ?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumber / responden. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan beberapa orang pejabat desa, pengelola BUMDes dan masyarakat pengguna jasa keuangan desa. Dengan menggunakan teknik proporsional sampling dengan sampel 1 orang Kepala Desa, 2 orang pengelola BUMDes dan 15 orang pengguna jasa keuangan desa. Sedangkan data sekunder yaitu data dan informasi pendukung yang diperoleh dari kantor BUMDes Desa Tohpati Klungkung Bali.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Tohpati Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Bali dengan mengamati dan pemetaan aktivitas masyarakat secara terukur. Waktu pengamatan sebagai objek analisis adalah kondisi 12 (dua belas) bulan dari Januari sampai dengan Desember berjalan tahun 2021. pertimbangan penggunaan 2021 diambil untuk memudahkan pencatatan informasi pada responden, yaitu Kepala Desa, Pengelola BUMDes dan masyarakat pengguna jasa keuangan desa.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui survei literatur dan survei lapangan serta wawancara mendalam. Wawancara yang dilakukan adalah pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup berakhir.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Walt Whitman Rostow dalam Protuslanx (2010)

Teori pertumbuhan ekonomi ini diklasifikasikan sebagai teori modernisasi. Pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah pertumbuhan ekonominya hanya dalam tiga tahap: tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. Walt Whitman Rostow kemudian mengembangkan ide tentang perspektif identifikasi dimensi ekonomi tersebut menjadi lima tahap kategori dalam bukunya *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* yang diterbitkan pada tahun 1960. Ia meluncurkan teorinya sebagai sebuah manifesto anti-komunis sebagaimana tertulis dalam bentuk

subjudul. Rostow menjadikan teorinya sebagai alternatif bagi teori Karl Marx mengenai sejarah modern. Fokusnya pada peningkatan pendapatan per kapita.

Rostow pulalah yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi '*less developed*', untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi '*more developed*' untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern. Dalam hal prekondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses di mana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap-tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan baru yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat unilinear dan universal, serta dianggap bersifat permanen.

2. Teori Praktik Sosial Bourdieu dalam Guma (2018)

Bourdieu menyusun teorinya ke dalam rumus (*Habitus x Modal*) + *Ranah* = *Praktik* (Fashri, 2007: 100). Relasi antara individu dan struktur dengan relasi antara habitus dan ranah yang melibatkan modal. Habitus merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Ranah diartikan sebagai jaringan relasi antarposisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran dan kehendak individual. Modal berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat dalam sistem pertukaran pada segala bentuk baik material maupun simbol. Tindakan manusia pada dasarnya tidak terlepas dari memperebutkan dan mempergunakan capital atau sumberdaya modal (*resources*) baik berupa modal politik, modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan juga modal intelektual dalam upaya mencapai kepentingannya.

Bourdieu memperkenalkan konsep-konsep kunci yang dapat menjelaskan bagaimana praktek sosial dapat dimungkinkan, yaitu habitus, ranah, dan modal. Habitus, secara etimologis, habitus merupakan sebuah kata dalam bahasa Latin berarti kebiasaan (*habitual*), penampilan diri (*appearance*), atau bisa menunjuk pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi tipikal tubuh. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, padanan kata yang paling mendekati habitus adalah kebiasaan. Konsep habitus sendiri bukan asli buatan Bourdieu, melainkan berasal dari tradisi pemikiran filsafat Barat yang dapat ditelusuri jejaknya hingga Aristoteles. Namun konsepsi habitus yang terdapat dalam pemikiran Thomas Aquinas memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsepsi habitus dari Bourdieu. Dengan konsep habitus, Bourdieu ingin mengkritik konsep jati diri manusia ala metafisika Aristotelian dan menjelaskan posisi manusia sebagai pelaku dan bagian dari struktur sekaligus.

Teknik Observasi, Wawancara, Studi Dokumentasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan sehingga dapat melihat dan mengamati secara lebih cermat tentang kondisi Desa Tohpati Klungkung Bali. **Wawancara** mendalam (*Indept Interview*) dengan beberapa informan yang telah ditetapkan 18 orang. **Studi dokumentasi**, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa dokumen atau catatan masa lalu di kantor BUMDes Desa Tohpati maupun instansi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Pertumbuhan Ekonomi Walt Whitman Rostow dalam Protuslanx (2010)

Teori pertumbuhan ekonomi ini diklasifikasikan sebagai teori modernisasi. Pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah pertumbuhan ekonominya hanya dalam tiga tahap: tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus-menerus. Walt Whitman Rostow kemudian mengembangkan ide tentang perspektif identifikasi dimensi ekonomi tersebut menjadi lima tahap kategori dalam bukunya *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* yang diterbitkan pada tahun 1960. Ia meluncurkan teorinya sebagai sebuah manifesto anti-komunis sebagaimana tertulis dalam bentuk subjudul. Rostow menjadikan teorinya sebagai alternatif bagi teori Karl Marx mengenai sejarah modern. Fokusnya pada peningkatan pendapatan per kapita.

Rostow pulalah yang membuat distingsi antara sektor tradisional dan sektor kapitalis modern. Frasa-frasa ini terkenal dengan terminologi '*less developed*', untuk menyebut kondisi suatu negara yang masih mengandalkan sektor tradisional, dan terminologi '*more developed*' untuk menyebut kondisi suatu negara yang sudah mencapai tahap industrialisasi dengan mengandalkan sektor kapitalis modern. Dalam hal prekondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses di mana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap-tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kritis

atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi-kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan baru yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat unilinear dan universal, serta dianggap bersifat permanen. Menurut Rostow proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan kedalam lima tahap. Lima tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, social dan politik yang terjadi. Proses pembangunan ekonomi menurut W.W Rostow bisa dibedakan dalam 5 tahap, yaitu :

(1) Tahapan Tradisional, Sistem ekonomi yang mendominasi masyarakat tradisional adalah pertanian, dengan cara-cara bertani yang tradisional. Produktivitas kerja manusia lebih rendah bila dibandingkan dengan tahapan pertumbuhan berikutnya. Masyarakat ini dicirikan oleh struktur hirarkis sehingga mobilitas sosial dan vertikal rendah. Pada masyarakat tradisional ilmu pengetahuan belum begitu banyak dikuasai , karena masyarakat pada saat itu, masih mempercayai kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan diluar kekuasaan manusia atau hal gaib . manusia yang percaya akan hal demikian, tunduk kepada alam dan belum bias menguasai alam akibatnya produksi sangat terbatas masyarakat tradisioanal itu cenderung bersifat statis (kemajuan berjalan sangat lamban) produksi dipakai untuk konsumsi sendiri, tidak ada di investasi. Generasi ke generasi tidak ada perkembangan, dalam hal ini yaitu antara orangtua dan anaknya, memiliki pekerjaan yang sama dan kedudukan yang sederajat .

Ciri-ciri tahap masyarakat tradisional adalah sebagai berikut: (a) Fungsi Produksi terbatas, cara produksi masih primitif, dan tingkat produktifitas masyarakat rendah. (b) Struktur sosial bersifat hierarkis, yaitu kedudukan masyarakat tidak berbeda dengan nenek moyang mereka. (c) Kegiatan politik dan pemerintahan di daerah-daerah berada di tangan tuan tanah.

(2) Tahapan Transisional, selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi dan hal itu memulai sebuah pembangunan yang dinamis. Model perkembangan ini merupakan hasil revolusi industri. Konsekuensi perubahan ini, yang mencakup juga pada perkembangan pertanian, yaitu tekanan kerja pada sektor-sektor primer berlebihan. Sebuah prasyarat untuk pra-kondisi tinggal landas adalah revolusi industri yang berlangsung dalam satu abad terakhir. Tahap prasyarat tinggal landas ini mempunyai 2 corak. Pertama adalah tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh Negara Eropa, Asia, Timur tengah, dan Afrika, dimana tahap ini dicapai dengan perombakann masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Corak yang kedua adalah tahap prasyarat tinggal landas yang dicapai oleh Negara-negara Born free (menurut Rostow) seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dimana Negara-negara tersebut mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merombak system masyarakat yang tradisional. Hal ini disebabkan oleh sifat dari masyarakat Negara-negara tersebut terdiri dari imigran yang telah mempunyai sifit-sifat yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk tahap prasyarat tinggal landas.

(3) Tahapan Lepas Landas, pada tahap tinggal landas, pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar baru. Sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut secara teratur akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Investasi yang semakin tinggi ini akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan demikian tingkat pendapatan perkapita semakin besar.

(4) Tahapan menuju ke kematangan ekonomi, tahap ini diartikan rostow sebagai masa dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor pemimpin lama yang sudah mengalami kemunduran. Sektor pemimpin baru ini coraknya ditentukan oleh perkembangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi, dan juga oleh kebijaksanaan pemerintah.

(5) Tahapan Produksi dan konsumsi massal, tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat sudah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi. Terdapat 3 macam tujuan masyarakat atau negara yaitu (a) Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain. (b) Menciptakan negara kesejahteraan dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif. (c) Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok yang meliputi pula barang yang tahan lama dan barang mewah.

Suatu negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Atau dalam bahasa teknis ekonominya produktivitas ini diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut. Dengan adanya tolak ukur ini, kita bisa membandingkan negara yang satu terhadap negara lainnya. Sebuah negara yang mempunyai GNP US\$1000 dianggap lebih berhasil pembangunannya daripada negara lain yang GNPnya US\$750. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah GNP US\$ 3.004,9 per tahun (tahun 2010). Meskipun angka ini naik sekitar 13 persen bila

dibandingkan pada tahun 2009, yakni sejumlah 2.349,6 dollar AS, angka ini masih berada di bawah negara-negara yang lebih muda, seperti Malaysia. Dengan ini, kita bisa menilai sejauh mana selama 60 tahun ini pembangunan membawa kesejahteraan bagi rakyat.

Konsep pendapatan nasional ini pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dari Inggris yang berusaha menaksir pendapatan nasional negaranya (Inggris) pada tahun 1665. Dalam perhitungannya, ia menggunakan anggapan bahwa pendapatan nasional merupakan penjumlahan biaya hidup (konsumsi) selama setahun. Namun, pendapat tersebut tidak disepakati oleh para ahli ekonomi modern sebab menurut pandangan ilmu ekonomi modern, konsumsi bukanlah satu-satunya unsur dalam perhitungan pendapatan nasional. Menurut mereka, alat utama sebagai pengukur kegiatan perekonomian adalah Produk Nasional Bruto (*Gross National Product, GNP*), yaitu seluruh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tiap tahun oleh negara yang bersangkutan diukur menurut harga pasar pada suatu negara. GNP sebuah negara bukan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa jadi kekayaan tersebut dimiliki tidak merata oleh penduduknya. Semisal sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Hal ini bias menimbulkan ironi. Kadang, kita bisa melihat sebuah negara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi namun di mana-mana kita lihat orang hidup miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak bisa makan, dan sebagainya. Ini pula yang kemudian ternyata terjadi di Indonesia. Pada 13 Desember 2007, majalah Forbes memublikasikan daftar 40 orang terkaya di Indonesia. Di mana bila digabungkan seluruh kekayaan mereka, diperoleh angka US\$ 38,02 miliar atau sekitar 372,4 Triliun rupiah. Fantastis! Sekaligus menjadi sebuah paradoks yang luar biasa besar di negeri ini. Sementara, mayoritas 1.10 Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota, rakyat di bawah garis kemiskinan, tidak bisa menikmati akses pendidikan, tak optimal menikmati layanan kesehatan.

Masalah pokok negara berkembang adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kebijakan dan perencanaan pembangunan Orde Baru adalah pembangunan dipusatkan di Jawa (khususnya di Jakarta) dengan harapan akan terjadi "trickle down effect" dengan orientasi pada pertumbuhan yang tinggi. Masalah kesenjangan, jika tidak berhati-hati dan tidak ditangani secara tepat, mempunyai potensi makin membesar dengan adanya deregulasi. Upaya deregulasi sebagai penyesuaian diri terhadap globalisasi membuka persaingan lebih leluasa. Yang kuat dan mampu bersaing akan lebih mampu memanfaatkannya dibandingkan dengan yang lebih lemah. Aset produktif dapat makin terkonsentrasi pada kelompok yang jumlahnya terbatas.

Untuk itu jika untuk menegakkan ekonomi pasar dan menggerakkan kegiatan ekonomi diperlukan deregulasi maka untuk mengatasi kesenjangan diperlukan intervensi, yakni melindungi dan memberi kesempatan bagi yang lemah untuk tumbuh. Inilah tema keberpihakan kepada yang lemah. Keseimbangan antara kebijakan-kebijakan deregulasi dan regulasi ini amat menentukan kemampuan bangsa untuk tumbuh secara berkesinambungan dengan gejala yang minimal. Kesejahteraan: Pendapatan perkapita Distribusi pendapatan Meningkat dan merata Menurun Meningkat dan tidak merata Tidak berubah dan tidak merata Pemerintah berhasil /Pemerintah gagal. Salah satu cara untuk mengukur kesejahteraan penduduk sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur PQLI (*Physical Quality of Life Index*). Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Moris yang mengukur tiga indikator, yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, rata-rata jumlah kematian bayi, dan rata-rata persentase buta dan melek huruf. a. Indeks pembangunan manusia (Human Development Index) The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, embangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat Desa Tohpati Klungkung berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *knowledge*, *attitude*, dan *skills*, di samping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya. Suatu negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak memedulikan dampak lingkungannya. Jika alam habis terkuras maka otomatis kehidupan masyarakat desa Tophapti Klungkung pun terancam. Inipulalah yang kemudian saat ini melanda Indonesia. Bisa dilihat beberapa waktu yang lalu dan hingga kini bencana terus menerus melanda sebagai indikator bahwa alam di negeri ini mengalami kerusakan parah, mulai dari pembalakan liar hingga pencemaran laut di luar kadar yang ditoleransikan.

Teori Praktik Sosial Bourdieu dalam Guma (2018)

Bourdieu menyusun teorinya ke dalam rumus (*Habitus x Modal*) + *Ranah* = *Praktik* (Fashri, 2007: 100). Relasi antara individu dan struktur dengan relasi antara habitus dan ranah yang melibatkan modal. Habitus merupakan hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Ranah diartikan sebagai jaringan relasi antarposisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari

kesadaran dan kehendak individual. Modal berperan sebagai sebuah relasi sosial yang terdapat dalam sistem pertukaran pada segala bentuk baik material maupun simbol. Tindakan manusia pada dasarnya tidak terlepas dari memperebutkan dan mempergunakan capital atau sumberdaya modal (*resources*) baik berupa modal politik, modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan juga modal intelektual dalam upaya mencapai kepentingannya. Bourdieu memperkenalkan konsep-konsep kunci yang dapat menjelaskan bagaimana praktek sosial dapat dimungkinkan, yaitu habitus, ranah, dan modal. Habitus, secara etimologis, habitus merupakan sebuah kata dalam bahasa Latin berarti kebiasaan (*habitual*), penampilan diri (*appearance*), atau bisa menunjuk pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi tipikal tubuh. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, padanan kata yang paling mendekati habitus adalah kebiasaan. Konsep habitus sendiri bukan asli buatan Bourdieu, melainkan berasal dari tradisi pemikiran filsafat Barat yang dapat ditelusuri jejaknya hingga Aristoteles. Namun konsepsi habitus yang terdapat dalam pemikiran Thomas Aquinas memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsepsi habitus dari Bourdieu. Dengan konsep habitus, Bourdieu ingin mengkritik konsep jati diri manusia ala metafisika Aristotelian dan menjelaskan posisi manusia sebagai pelaku dan bagian dari struktur sekaligus.

Jika mengikuti skema metafisika Aristotelian, substansi dari manusia harus ditentukan terlebih dahulu jika ingin menentukan jati diri dari manusia. Dengan skema ini, jati diri manusia dianggap memiliki suatu kebenaran yang tetap dan tidak terpengaruh oleh berbagai aksidensi-aksidensi temporal termasuk *habitus*. Jati diri manusia menjadi sesuatu yang terberi dan diterima-begitu-saja. Segala bentuk historisitas manusia tidak mempengaruhi jati diri asali manusia. Oleh karena untuk mengetahui jati diri asali manusia membutuhkan abstraksi dan pemilahan yang hati-hati dari berbagai aksidensi dan habitusnya, maka apa yang tampak dari manusia berbagai perilaku, praksis, dan habitus manusia dalam kesejarahannya hanyalah aksidensi yang kebetulan saja. Dengan konsepsi habitus, historisitas dan aksidensi dari manusia melekat dan menyatu dengan substansi atau jati diri asali manusia. Jati diri asali manusia dengan demikian senantiasa dapat berubah-ubah dan dipengaruhi oleh praktek kehidupan sosialnya. Jati diri manusia tidak lagi dianggap terberi dan diterima-begitu-saja. Habitus manusia menjadi terpengaruh oleh ruang dan waktu sehingga dapat berubah sesuai sejarah dan posisinya di lingkungan sosial.

Manusia, sebagai individu yang berelasi dengan struktur sosialnya, merupakan agen yang aktif sekaligus pasif dalam membentuk habitusnya. Dalam membentuk habitusnya, agen tidak pernah bisa terlepas dari pengaruh yang diberikan struktur sosialnya. Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai "Sistem yang tahan lama, disposisi transposable, struktur terstruktur cenderung berfungsi sebagai struktur penataan, yaitu, sebagai prinsip-prinsip generasi dan penataan praktik dan representasi yang dapat secara obyektif" diatur dan teratur "di mana pun merupakan produk kepatuhan terhadap aturan, obyektif disesuaikan dengan tujuan mereka tanpa mengandaikan tujuan bertujuan sadar atau penguasaan operasi yang diperlukan untuk menangkap mereka dan, dengan semua ini, secara kolektif diatur tanpa menjadi produk dari tindakan konduktor yang mengatur". Melalui habitus, sebagai struktur yang mengstrukturkan dan distrukturkan, struktur social termasuk norma-norma dan perilaku social ditubuhkan ke dalam diri agen yang kemudian direproduksi ulang oleh agen melalui praktek sosialnya. Habitus ini bersifat imanen. Habitus dibentuk melalui praktek keseharian manusia secara tidak sadar. Struktur dari habitus diproduksi dari pengalaman yang bersifat ekonomis dan sosial. Pengalaman ini terjadi dalam lingkup keluarga yang kemudian memproduksi dan mereproduksi habitus. Berdasarkan pengalaman inilah habitus kemudian dijadikan basis untuk memersepsi dan mengapresiasi pengalaman-pengalaman berikutnya. Sebagai disposisi (struktur yang menubuh) yang dapat dipindah-pindah, habitus dapat diterapkan dalam berbagai ranah. Sebagai contoh untuk memperjelas, kita dapat melihat dari perilaku seorang gadis Jawa. Seorang gadis Jawa yang dibesarkan dalam lingkungan keluarganya, baik dari kaum priayi maupun *wong cilik*, akan menunjukkan bagaimana seorang gadis Jawa seharusnya berperilaku dan bertindak dalam praktek sosialnya sehari-hari seperti menggunakan bahasa Jawa *kromo-inggil* untuk berbicara dengan orang tua atau atasan dan menggunakan bahasa Jawa *ngoko* untuk berbicara dengan teman sebaya yang akrab. Singkatnya, habitus merupakan produk sejarah, yang darinya praktek individual dan kelompoknya dihasilkan. Praktek yang dihasilkan habitus cenderung sama dengan struktur pembentuknya, dan dengan demikian cenderung mereproduksi struktur pembentuknya itu. Namun habitus tidak boleh dipahami semata sebagai reproduksi mekanis monoton dari struktur pembentuknya; ia lebih merupakan struktur generatif yang dapat ditambahi berbagai inovasi dari agen.

Ranah, struktur sosial, selain dijelaskan oleh Bourdieu sebagai disposisi, yaitu struktur sosial yang ditubuhkan atau habitus, juga dijelaskan oleh Bourdieu sebagai struktur objektif yang berada di luar agen yang bisa disebut sebagai ranah. Relasi antara habitus dengan ranah bersifat dialektis. Dengan habitus, sebagai struktur objektif yang diinternalisasikan ke diri agen dibentuk dari struktur objektif ranah tempat diri agen berada. Struktur objektif di mana mekanisme kerja ranah berasal dibentuk dari habitus para agen penyusunnya melalui praktek sosial mereka. Seperti mekanisme kerja habitus, mekanisme struktur ranah bekerja di luar kesadaran agen. Kemampuan untuk mengonstruksi realitas dunia sosial sebagai sesuatu yang terberi ini oleh Bourdieu disebut sebagai kuasa simbolik. Dunia sosial di mana agen berada bukanlah suatu ranah tunggal dengan hukum dan mekanisme tunggal. Dunia sosial terbagi ke dalam ranah-ranah, yaitu wilayah-wilayah sosial yang berbeda dan semi-otonom terhadap ranah-ranah lain. Artinya, ranah-ranah bekerja dengan mekanisme, hukum, dan logika yang

kelas, tetapi saling mempengaruhi sesuai tingkat otonomi relatifnya. Pembagian dunia sosial dan otonomisasi ranah dengan mekanisme khususnya terjadi melalui proses menyejarah yang lambat dan lama. Pada masyarakat tradisional, pembagian dunia sosial ini belum memiliki distingsi yang jelas.

Ranah ekonomi, hukum, pendidikan, dan politik pada masyarakat Kabyle di Algeria misalnya, masih memiliki mekanisme yang diatur oleh agama mereka. Beralih pada masyarakat modern, ranah-ranah dalam dunia sosial mereka sudah terdistingsi dengan baik dalam institusi-institusi sehingga memiliki tingkat semi-otonom tertentu. Institusi pendidikan misalnya hanya mengurus persoalan-persoalan pendidikan seperti kurikulum dan regulasi pendidikan. Begitu juga dengan institusi ekonomi, hukum, politik, dan agama. Berkat rasionalisasi yang dibawa oleh modernitas ranah-ranah tersebut dapat memiliki mekanisme struktur yang lebih mandiri. Dikarenakan ranah merupakan arena produksi dan reproduksi struktur objektif, maka Bourdieu dapat mengatakan bahwa ranah merupakan arena dari perjuangan dan perebutan sumber daya (modal) serta arena dari perebutan posisi yang dilakukan para agen. Usaha perebutan ini tidak lain bertujuan untuk memaksakan mode produksi dan reproduksi struktur dari habitus kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi. Dengan mendominasi ranah, kelompok dominan dapat menentukan mekanisme struktur yang legitim serta membentuk sebuah hierarki kekuasaan dalam ranah. Semakin otonom suatu mekanisme struktur, semakin mudah pula dominasi atas struktur tersebut dapat dicapai. Strategi pendominasian juga sangat dipengaruhi oleh posisi yang dimiliki agen dalam ranah Modal, merupakan sumber daya berharga yang diperebutkan oleh agen pada perjuangannya dalam ranah, suatu properti spesifik yang terdistribusi dalam ranah yang menentukan kesuksesan mereka, serta sebagai kemenangan atau keuntungan spesifik yang dipertaruhkan dalam ranah. Bourdieu menjelaskan modal sebagai “kerja yang terakumulasi (dalam bentuk terbenak atau menubuh) yang, jika dimiliki eksklusif, oleh agen atau sekelompok agen, memungkinkan mereka memiliki energi sosial dalam bentuk kerja yang direifikasi maupun yang hidup”. Modal ini tidak bisa hanya dimengerti sebagai modal ekonomi saja. Untuk mengetahui struktur dari dunia sosial dan mekanisme kerjanya, modal yang ada dalam struktur atau ranah harus dimengerti dalam berbagai bentuknya. Dengan menguasai modal dalam berbagai bentuknya, seseorang dapat menentukan posisinya sebagai penguasa struktur ranah.

Bourdieu mengidentifikasi empat bentuk modal yang menjadi rebutan dalam ranah, tergantung di ranah mana ia berada: *modal ekonomi* yang dapat dikonversi langsung ke bentuk uang dan hak milik secara institusional; *modal kultural*, yaitu ilmu dan pengetahuan, yang dalam beberapa kondisi dapat dikonversi menjadi modal ekonomi dan kualifikasi pendidikan (ijazah dan sertifikat); *modal sosial* yang berarti koneksi dan obligasi sosial serta dapat dikonversi ke dalam modal ekonomi dan status kebangsawanan; serta *modal simbolik* yang berarti modal dalam bentuk apapun selama direpresentasi secara simbolik mengandaikan intervensi dari habitus. Bentuk-bentuk modal ini dapat saling dikonversikan dan diwariskan pada pihak lain dengan nilai tukar dan tingkat kesulitan yang berbeda. Masing-masing jenis modal ini didapat dan diakumulasikan dengan saling diinvestasikan dalam bentuk-bentuk modal lain (sebagai terbenak dan menubuh).

Pendidikan harus juga dipahami sebagai ranah di mana para agen di dalamnya merupakan pejuang yang memperjuangkan habitusnya sekaligus petarung yang memperebutkan posisi dominan dalam ranah.

Kedua bentuk modal kultural terakhir berasal dari bentuk modal kultural yang pertama. Modal kultural menubuh merupakan bentuk modal kultural yang hanya dimiliki oleh subjek sendiri yang akan ia bawa sampai mati. Bentuk modal kultural ini tidak bisa diperoleh dengan instan dan memerlukan waktu agar dapat menubuh dengan subjek. Modal kultural baru dapat dipindah-pindah dan ditransfer ke subjek lain serta dapat dikonversi menjadi modal ekonomi ketika berada dalam bentuk terbenak. Kepemilikan modal kultural terbenak pun dapat menjadi sebuah bentuk modal simbolik berupa prestise dan simbol ‘orang berilmu’.

Bentuk modal kultural yang paling rentan berubah menjadi modal simbolik adalah bentuk terinstitusionalisasi. Titel kebangsawanan dan kesarjanaan tidak hanya menjadi prestise saja. Bentuk tersebut sudah menjadi pengakuan formal dari struktur dominan yang berkuasa atas kecakapan seorang agen atau institusi, meski secara empiris dapat bersifat kontradiktif. Subjek yang memiliki modal terinstitusi ini, pada suatu struktur sosial modern yang terasionalisasi, dapat dengan mudah mendulang modal ekonomi dan modal sosial dari status yang dimilikinya. Tingkat kemudahan itu bergantung pada posisi subjek dalam struktur. Seorang *archduke* (gelar kebangsawanan tingkat tinggi di Eropa) akan lebih mudah mendapatkan modal ekonomi dan relasi kekuasaan sosial daripada seorang *baron* (gelar kesatria tinggi di Eropa). Seorang profesor juga akan lebih mudah mendulang kekayaan dari kegiatan akademiknya serta akses ke berbagai referensi akademik daripada seorang sarjana lulusan strata satu universitas.

Ranah kultural sendiri dibangun atas pembedaan antara dua jenis selera yang pembedanya diatur oleh kelompok dominan. Kelompok dominan cenderung memiliki selera kultural yang sangat ketat serta produk kultural yang diproduksi dengan sangat terbatas sehingga selera kultural umum dan *pop* dianggap sebagai selera kultur rendah. Dengan demikian, masyarakat kelas bawah akan berusaha tidak hanya meningkatkan jumlah kepemilikan modal ekonomi namun juga jumlah kepemilikan dari modal kultural. Dengan distingsi “selera tinggi-

selera rendah” inilah kekerasan simbolik dapat tetap terjaga dalam ranah kultural yang direproduksi melalui ranah pendidikan.

Kemungkinan untuk Pembebasan, mngkinkah pendidikan dapat dijadikan sebagai instrumen pembebasan? Pertanyaan ini sering dilontarkan kepada Bourdieu untuk mengetahui *standing-position* Bourdieu mengenai pendidikan. Di satu sisi, Bourdieu menjelaskan keberadaan relasi kuasa simbolik yang berada di balik pendidikan sebagai penentangan implisit terhadap relasi kekuasaan yang mengontrol pendidikan. Namun, di sisi lain Bourdieu tidak memberikan solusi tegas atas pembongkaran yang ia lakukan sebagai pernyataan eksplisitnya. Beberapa pembaca Bourdieu mencoba memberikan penjelasan mengenai *standing-position* dari Bourdieu.

Beberapa pembela pemikiran Bourdieu tentang pendidikan sebagai instrumen pembebasan menjelaskan *standing-position* Bourdieu tersebut dalam analisis mereka terhadap habitus. Bagi Richard Harker, habitus bukanlah sarana determinasi struktur terhadap agen tetapi sarana mediasi antara struktur dengan agen. Reproduksi yang terjadi melalui habitus tidak pernah benar-benar sempurna, selalu ada diskontinuitas yang memungkinkan kehendak bebas dari agen manusia untuk bergerak. Kemungkinan kehendak bebas dari habitus inilah yang memungkinkan agen manusia dapat memilah-milah apa yang ditawarkan pendidikan sebagai tepat untuk dirinya sehingga ia dapat membebaskan dirinya dari kekangan sistem. Diane Reay menambahkan bahwa kemungkinan pendidikan menjadi transformator adalah ketika habitus ditabrakkan pada ranah pendidikan yang tidak ia kenali sehingga terjadi kesadaran akan habitus yang menyebabkan introspeksi diri agen.

Pendidikan tidak bisa hanya sekadar dipahami sebagai sarana produksi dan reproduksi semata. Pendidikan harus juga dipahami sebagai ranah di mana para agen di dalamnya merupakan pejuang yang memperjuangkan habitusnya sekaligus petarung yang memperebutkan posisi dominan dalam ranah. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa pendidikan merupakan “pasar” di mana terdapat produsen modal kultural dan konsumen modal tersebut. Apa yang terlupakan dari analisis dua ahli di atas adalah praktek tidak saja dimungkinkan oleh habitus. Praktek sosial yang dibentuk melalui habitus bekerja dalam ranah kultural sebagai arena perjuangan dan perebutan posisi serta arena mendulang kekayaan modal (dalam berbagai bentuknya). Jumlah modal kultural yang dimiliki agen dapat menentukan posisi agen dalam ranah. Kepemilikan modal kultural bukanlah sesuatu yang pasif.

Modal kultural dapat menyadarkan diri agen akan posisinya di ranah. Ketika ia memiliki modal kultural yang sedikit, ia berada pada posisi subordinat dan tak mampu memberikan legitimasi pada praktek sosialnya yang dibentuk oleh habitusnya serta tidak mampu menjelaskan dan mengkritik ketimpangan dan dominasi yang terjadi. Tetapi ketika agen memiliki modal kultural yang melimpah ia dapat terbebas dari posisi subordinat tersebut. Ia dapat memberi legitimasi pada praktek sosial yang terbentuk oleh habitusnya. Ia juga dapat memberi kritik bahkan membongkar praktek dominasi simbolik dari sistem habitus yang berkuasa sebelumnya. Kepemilikan modal kultural yang melimpah mengubah posisinya dari bagian dari kaum yang subordinat menjadi bagian dari kelompok yang mendominasi. Sebagai bagian dari kaum yang mendominasi, ia akan memproduksi modal kulturalnya sendiri dan berusaha mendominasi ranah dengan distribusi modal kulturalnya sehingga legitimasi atas habitusnya yang mendominasi ranah. Pendek kata, dengan menguasai kepemilikan jumlah modal kultural terbanyak, agen dapat terbebas dari posisinya sebagai bagian dari yang terdominasi dan berubah menjadi bagian dari kaum yang mendominasi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah ia harus tetap bertarung untuk memperjuangkan posisi dominannya karena tak hanya ia yang tergiur untuk menjadi penguasa.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bourdieu mengidentifikasi empat bentuk modal yang menjadi rebutan dalam ranah, tergantung di ranah mana ia berada: *modal ekonomi* yang dapat dikonversi langsung ke bentuk uang dan hak milik secara institusional; *modal kultural*, yaitu ilmu dan pengetahuan, yang dalam beberapa kondisi dapat dikonversi menjadi modal ekonomi dan kualifikasi pendidikan (ijazah dan sertifikat); *modal sosial* yang berarti koneksi dan obligasi sosial serta dapat dikonversi ke dalam modal ekonomi dan status kebangsawanan; serta *modal simbolik* yang berarti modal dalam bentuk apapun selama direpresentasi secara simbolik mengandaikan intervensi dari habitus. Bentuk-bentuk modal ini dapat saling dikonversikan dan diwariskan pada pihak lain dengan nilai tukar dan tingkat kesulitan yang berbeda. Masing-masing jenis modal ini didapat dan diakumulasikan dengan saling diinvestasikan dalam bentuk-bentuk modal lain (sebagai terbenak dan menubuh).

Pendidikan harus juga dipahami sebagai ranah di mana para agen di dalamnya merupakan pejuang yang memperjuangkan habitusnya sekaligus petarung yang memperebutkan posisi dominan dalam ranah. Dengan pendidikan, Bourdieu tidak hanya berusaha membebaskan para pembacanya dari relasi kuasa yang berada di balik dunia intelektual dan pendidikan sebagai sebuah sistem simbolik yang mendominasi. Bourdieu juga memberi tahu para pembacanya bahwa mereka tidak akan pernah bisa terlepas dari sistem pendidikan dan intelektual sebagai sistem simbolik yang mendominasi. Terakhir, Bourdieu juga ingin memberi tahu dari relasi kuasa yang berada di balik dunia intelektual dan pendidikan sebagai sebuah sistem simbolik yang mendominasi. Bourdieu menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa terlepas dari sistem pendidikan dan intelektual sebagai sistem simbolik yang mendominasi.

Temuan

Rangsangan di berikan BUMDes bagi pengusaha muda di Desa Tohpati Klungkung Bali sangat berarti dalam meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan social masyarakat secara keseluruhan. *Modal ekonomi* yang dapat dikonversi langsung ke bentuk uang dan hak milik secara institusional; *modal kultural*, yaitu ilmu dan pengetahuan, yang dalam beberapa kondisi dapat dikonversi menjadi modal ekonomi dan kualifikasi pendidikan (ijazah dan sertifikat); *modal sosial* yang berarti koneksi dan obligasi sosial serta dapat dikonversi ke dalam modal ekonomi dan status kebangsawanan; serta *modal simbolik* yang berarti modal dalam bentuk apapun selama direpresentasi secara simbolik mengandaikan intervensi dari habitus. Bentuk-bentuk modal ini dapat saling dikonversikan dan diwariskan pada pihak lain dengan nilai tukar dan tingkat kesulitan yang berbeda.

PENUTUP

Simpulan

Pertama, Menurut Rostow proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan kedalam lima tahap. Lima tahap tersebut adalah karakteristik perubahan keadaan ekonomi, social dan politik yang terjadi. Proses pembangunan ekonomi menurut W.W Rostow bisa dibedakan dalam 5 tahap, yaitu (1) Tahapan Tradisional, sistem ekonomi yang mendominasi masyarakat tradisional yaitu pertanian, dengan cara-cara bertani yang tradisional. Masyarakat Desa Tohpati Klungkung Bali ini dicirikan oleh struktur hirarkis sehingga mobilitas sosial dan vertikal rendah. Pada masyarakat tradisional ilmu pengetahuan belum begitu banyak dikuasai, karena masyarakat pada saat itu, masih mempercayai kepercayaan-kepercayaan tentang kekuatan diluar kekuasaan manusia atau hal gaib. (2) Tahapan Transisional, selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi dan hal itu memulai sebuah pembangunan yang dinamis. Model perkembangan ini merupakan hasil revolusi industri. Konsekuensi perubahan ini, yang mencakup juga pada perkembangan pertanian, yaitu tekanan kerja pada sektor-sektor primer berlebihan. (3) Tahapan Lepas Landas, pada tahap tinggal landas, pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Pada awal tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat seperti seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar baru. (4) Tahapan menuju ke kematangan ekonomi, tahap ini diartikan Rostow sebagai masa dimana masyarakat Desa Tohpati Klungkung Bali sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor pemimpin lama yang sudah mengalami kemunduran (5) Tahapan Produksi dan konsumsi massal, tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat sudah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi.

Kedua, Teori Praktik Sosial Bourdieu memperkenalkan konsep-konsep kunci yang dapat menjelaskan bagaimana praktek sosial dapat dimungkinkan, yaitu habitus, ranah, dan modal. Habitus, secara etimologis, habitus merupakan bahasa Latin berarti kebiasaan (*habitual*), penampilan diri (*appearance*), atau bisa menunjuk pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi tipikal tubuh. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, padanan kata yang paling mendekati habitus adalah kebiasaan. Konsep habitus sendiri bukan asli buatan Bourdieu, melainkan berasal dari tradisi pemikiran filsafat Barat yang dapat ditelusuri jejaknya hingga Aristoteles. Namun konsepsi habitus yang terdapat dalam pemikiran Thomas Aquinas memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsepsi habitus dari Bourdieu. Dengan konsep habitus, Bourdieu ingin mengkritik konsep jati diri manusia ala metafisika Aristotelian dan menjelaskan posisi manusia sebagai pelaku dan bagian dari struktur sekaligus. Teori praktik dari Bourdieu dapat menjelaskan bahwa terjadinya pada masyarakat Desa Tohpati Klungkung Bali praktik pemerataan pemberian bantuan agar apa yang dikeluhkan selama ini ada solusinya yang telah menjadi acuan pendirian BUMDes sebagai cerminan dari faktor habitus, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi sudah sejak lama yang dilaksanakan masyarakat desa Tohpati Klungkung Bali merupakan hasil pembelajaran secara halus, melakukan distribusi pemberian bantuan kredit kepada masyarakat berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Klungkung. Kepemilikan dan penguasaan modal budaya, sosial, simbolik serta intelektual oleh aparat desa dalam distribusi pemikiran positif yang bermanfaat bagi kelangsungan masyarakat desa. Di dalam ranah ada perkembangan modernitas sosial, di setiap dusun di Desa Tohpati menerapkan pola pemerataan pinjaman dari BUMDes dan model pemberian bantuan dengan mengacu pada aturan yang diberlakukan. Suatu bentuk kekerasan simbolik dalam suatu struktur.

Saran

Perkembangan desa menjadi lebih baik tergantung dari pengelolaan benefit BUMDes. Perkembangan desa mejadil lebih baik jika pengguna jasa keuangan agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber dana dan perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Annabelle Sreberny. (2006). "The Global and the Local in International Communications", USA: Blackwell
- Arjun Appadurai. (2006). "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy", G. Durham & Douglas M. Kellner, *Media and Cultural Studies: KeyWorks*, USA: Blackwell.
- Barker, Chris. (2006). *Cultural Studies, Teori dan Praktik*. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Baudrillard, Jean. (1998). *The Consumer Society : Myth and Structures*. London: Sage Publisher. Hal, 69.
- Beilharz, Peter. (2003). *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ben Agger. (2007). *Teori Sosial Kritis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Brata, IB. (2012). *Komodifikasi Telajakan pada Era Globalisasi di Desa Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar*.
- David Morley and Kevin Robins. (1995). "Spaces of Identity": *Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries*, London-New York: Routledge.
- Djam'an, Satori. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA.
- George Coedes. (1998). "The Indianized States of Southeast Asia", Hawaii: University of Hawaii Press.
- Jan Nederveen Pieterse. (2006). "Globalization as Hybridization", G. Durham & Douglas M. Kellner, *Media and Cultural Studies: KeyWorks*, USA: Blackwell.
- John Tomlinson. (2003). "Globalization and Cultural Identity", *The Global Transformations Reader: An Introduction to the Globalization*, Cambridge : Polity.
- M.G. Durham & Douglas M. Kellner. (2006). "Media and Cultural Studies": *KeyWorks*, USA: Blackwell.
- Michel, Picard. (2006). *Bali: Tourisme Culturel et Culture Touristique* (Penerjemah Jean Couteau dan Warih Wisatsana). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) Forum Jakarta-Paris.
- Moleong, Lexi J. (2018). *Metodologi Penelitian*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.